



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JUFRI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BINJAI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : IDIANTO, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, 20 Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
SUMATERA UTARA,



(IDIANTO, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BINJAI



(JUFRI, S.H., M.H.)

PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BINJAI TAHUN 2025

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat	96
2	Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Transformasi Sistem Penuntutan	Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip Keadilan	98%
		Penanganan Perkara Pidana Khusus dan TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan	98%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3	Meningkatnya Efektivitas Penyelamatan dan Pemulihan Aset serta Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara	Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara	95%
		Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana dan Perdata	95%
4	Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan dan Akuntabel	Nilai Evaluasi Internal SAKIP	95
		Nilai Kinerja Anggaran	98

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.229.732.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 13.440.346.000
Jumlah		Rp. 14.670.078.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Binjai, 20 Januari 2025,

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,





**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAFFLES DEVIT MARIANTO NAPITUPULU, S.H., M.IP., M.H.
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI
BINJAI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JUFRI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BINJAI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, 20 Januari 2025.

Pihak Kedua;

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BINJAI

(JUFRI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama.

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI BINJAI

(RAFFLES DEVIT MARIANTO
NAPITUPULU, S.H., M.IP., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI BINJAI
TAHUN 2025**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualita dan Kuantitas	Persentase SDM Kejaksaan Republik Indonesia yang Telah	Faktor Pembilang: Jumlah pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang	50%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan Republik Indonesia	Memiliki Sertifikat sesuai Standar Kompetensi	telah memperoleh sertifikat sesuai standar kompetensi Faktor Penyebut: Jumlah pegawai Kejaksaan Negeri $X 100$	
		Persentase Pejabat Struktural sesuai Kompetensi	Faktor Pembilang: Jumlah pejabat struktural yang mengikuti asesmen kompetensi Faktor Penyebut: Jumlah pejabat struktural $X 100$	50%
		Persentase SDM sesuai Kebutuhan	Faktor Pembilang: Jumlah SDM yang sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja Faktor Penyebut: Jumlah SDM Kejaksaan Negeri $X 100$	80%
2.	Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran Kejaksaan RI	Persentase Pengelolaan Keuangan secara Optimal	Faktor Pembilang: Realisasi anggaran Faktor Penyebut: Jumlah pagu anggaran $X 100$	90%
3.	Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Kejaksaan Berbasis Teknologi Informasi (TI)	Persentase Kegiatan Yang Diselesaikan sesuai dengan Master Plan TI Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024	Faktor Pembilang: Jumlah terlaksananya kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan Master Plan TI Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 Faktor Penyebut: Jumlah kegiatan dalam Master Plan TI Kejaksaan Tahun 2020-2024 $X 100$	75%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Persentase Mengoperasikan <i>Case Management System (CMS)</i> dalam rangka mendukung Sistem Peradilan Pidana Terpadu Teknologi Informasi (SPPT-TI)	<p>Faktor Pembilang:</p> <p>Jumlah pengoperasian CMS dalam rangka mendukung SPPT-TI</p> <p>Faktor Penyebut:</p> <p>Jumlah pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus</p> <p>X 100</p>	90%
		Persentase Kepatuhan dalam Mengisi CMS secara Lengkap	<p>Faktor Pembilang:</p> <p>Kepatuhan pelaporan pada tahap pra penuntutan + tahap penuntutan</p> <p>Faktor Penyebut:</p> <p>2 (tahap pra penuntutan dan tahap penuntutan)</p> <p>X 100</p>	90%
4.	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara	<p>Faktor Pembilang:</p> <p>Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, penetapan status penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang diselesaikan</p> <p>Faktor Penyebut:</p> <p>Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, PSP, hibah, dan lainnya yang ditangani</p> <p>X 100</p>	80%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>Persentase Penyelesaian Pemulihan Negara Aset</p>	<p>Faktor Pembilang: Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p> <p>Faktor Penyebut: Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya dan pendampingan kementerian/lembaga dan lintas negara</p> <p>X 100</p>	80%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>Faktor Pembilang: Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil pelaksanaan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p> <p>Faktor Penyebut: Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, dan pendampingan kementerian/lembaga dan lintas negara</p> <p>X 100</p>	
			<p>Faktor Pembilang: Nilai barang rampasan, sita eksekusi, dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda dan pidana tambahan lainnya</p> <p>Faktor Penyebut: Nilai uang pengganti, denda, dan pidana tambahan lainnya dalam berdasarkan Putusan Pengadilan yang <i>inkracht van gewijsde</i> yang masih memiliki hak tagih</p> <p>X 100</p>	

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja Kejaksaaan Negeri Republik Indonesia	Persentase Satuan Kerja yang Memiliki Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan	<p>Faktor Pembilang: Jumlah pengadaan sarana prasarana yang berhasil direalisasikan</p> <p>Faktor Penyebut: Jumlah pengadaan sarana prasana</p> <p>X 100</p>	80%

No	Kegiatan	Anggaran:
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 13,325,346,000
2.	Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaaan RI	Rp. 205,000,000
Jumlah		Rp. 13,530,346,000

Binjai, 20 Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BINJAI



(DUPRI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI BINJAI,



(RAFFLES DEVIT MARIANTO
NAPITUPULU, S.H., M.IP., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NOPRIANTO SIHOMBING, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI BINJAI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JUFRI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BINJAI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, 20 Januari 2025,


Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BINJAI

(JUFRI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI BINJAI


(NOPRIANTO SIHOMBING, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI BINJAI
TAHUN 2025**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	Jumlah laporan pengamanan pembangunan strategis yang diselesaikan tepat waktu ----- x 100 Surat perintah pengamanan pembangunan strategis	100%
2.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum	Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	1. Jumlah penerima penerangan hukum ----- x 100 Jumlah target penerima penerangan hukum 2. Jumlah penerima penyuluhan hukum ----- x 100 Jumlah target penerima penyuluhan hukum	100%
3.	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Laporan LIDPAMGAL yang diselesaikan tepat waktu -----x 100 Surat perintah LIDPAMGAL yang diterbitkan	100%
		Persentase Pelaksanaan Pengawasan Ailan Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang	Laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu -----x 100 Surat perintah PAKEM yang diterbitkan	100%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Kejaksanaan Negeri		
		Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Posko Intelijen yang dilaksanakan}}{\text{Target Kegiatan Posko Intelijen}} \times 100$	100%
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Aset yang dilaksanakan}}{\text{Target Kegiatan Pelacakan Aset}} \times 100$	100%
		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pencarian Buronan/DPO yang berhasil dilaksanakan}}{\text{Target Kegiatan Pencarian Buronan/DPO}} \times 100$	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamana dan Penggalangan	Rp. 40.000.000
2.	Pengawasan Allran Kepercayaan Masyarakat	Rp. 58.000.000
3.	Kampanye Anti Korupsi	Rp. 20.000.000
4.	Penerangan Hukum	Rp. 38.976.000
5.	Penyuluhan Hukum	Rp. 52.400.000
	Jumlah	Rp. 209.384.000

Binjai, 20 Januari.

Pihak Kedua,



KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BINJAI

(JUFRI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI BINJAI

(NOPRIANTO SIHOMBING, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : ANDRI DHARMA, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI
BINJAI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JUFRI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BINJAI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Binjai, 20 Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BINJAI

(JUFRI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI BINJAI

(ANDRI DHARMA, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI BINJAI
TAHUN 2025**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif	Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	<p>Faktor Pembilang : Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan</p> <p>Faktor Penyebut : Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restoratif berdasarkan peraturan perundang-undangan</p> <p>X 100</p>	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>inkracht van gewijsdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan telah Dieksekusi	<p>Faktor Pembilang : Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan)</p> <p>Faktor Penyebut : Jumlah putusan perkara tindak pidana umum tingkat pertama berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan)</p> <p>X 100</p>	100%

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Perkara Pidana Umum dalam Tahap Pra Penuntutan	Rp. 21,500,000
2.	Perkara Pidana Umum dalam Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan	Rp. 316,373,000
3.	Perkara Pidana Umum dalam Tahap Upaya Hukum dan Pelaksanaan Eksekusi	Rp. 51,000,000

4.	Restorative Justice	Rp. 1,500,000
	Jumlah	Rp. 390,373,000


Binjai, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,


KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BINJAI
(JUFRI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI BINJAI


(ANDRI DHARMA, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ULI ARTHA SITANGGANG, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN
NEGERI BINJAI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JUFRI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BINJAI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, 20 Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BINJAI

(JUFRI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI BINJAI

(ULI ARTHA SITANGGANG, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI BINJAI
TAHUN 2025**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	Faktor Pembilang: Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat Faktor Penyebut: Jumlah laporan pengaduan masyarakat pada tahun berjalan X 100	100% 60%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	Faktor Pembilang: Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan Faktor Penyebut: Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan pada tahun berjalan X 100	75%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	Faktor Pembilang: Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan Faktor Penyebut: Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap penyidikan pada tahun berjalan X 100	100%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	Faktor Pembilang: Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan Faktor Penyebut: Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Pra	100%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penuntutan pada tahun berjalan X 100	
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	<p>Faktor Pembilang: Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan</p> <p>Faktor Penyebut: Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU di tahap Penuntutan pada tahun berjalan X 100</p>	50%
		Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	<p>Faktor Pembilang: Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang Berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan)</p> <p>Faktor Penyebut: Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun berjalan (badan dan barang bukti/barang rampasan) X 100</p>	100%
		Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus	<p>Faktor Pembilang: Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah dieksekusi</p> <p>Faktor Penyebut: Jumlah pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap X 100</p>	50%
2.	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana	Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak)	<p>Faktor Pembilang: Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil</p>	50%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGE T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	diselesaikan pada tahap pra penuntutan Faktor Penyebut: Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU tahap pra penuntutan X 100	
Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan		Faktor Pembilang: Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan Faktor Penyebut: Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan X 100	50%	
Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang telah Dieksekusi		Faktor Pembilang: Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU berkekuatan hukum tetap yang berhasil dieksekusi (badan dan barang bukti/barang rampasan) Faktor Penyebut: Jumlah perkara tindak pidana khusus (kepabeaan, cukai, dan pajak) dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap (badan dan barang bukti/barang rampasan) X 100	50%	
3.	Konsensus Penuntutan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang Berat	Persentase Penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran HAM yang Berat	Faktor Pembilang: Jumlah laporan kegiatan terkait penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat Faktor Penyebut:	50%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGE T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	dengan instansi terkait		Jumlah kegiatan dalam rangka penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat X 100	


No	Kegiatan	Anggaran
1.	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan	Rp. 59.600,000
2.	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan	Rp. 200.000,000
3.	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan	Rp. 206.000,000
4.	Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya	Rp. 6.000,000
Jumlah		Rp. 471,600,000

Binjai, 20 Januari 2025,

Pihak Kedua,


KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BINJAI
(JUFRI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI BINJAI

(ULI ARTHA SITANGGANG, S.H., M.H.)



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HORAS MONANG JEFFRY ANDI GULTOM, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JUFRI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BINJAI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, 20 Januari 2025,

Pihak Kedua,


KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BINJAI
(JUFRI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TUN
KEJAKSAAN NEGERI BINJAI

(HORAS MONANG JEFFRY ANDI GULTOM,
S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI BINJAI**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2023:

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	<p>Faktor Pembilang:</p> <p>Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan</p> <p>Faktor Penyebut:</p> <p>Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan</p> <p>X 100</p>	100%
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Melalui Jalur Non Litigasi	<p>Faktor Pembilang:</p> <p>Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan</p> <p>Faktor Penyebut:</p> <p>Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun berjalan</p> <p>X 100</p>	100%
		Persentase Perkara Tata Usaha Negara yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi	<p>Faktor Pembilang:</p> <p>Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan</p> <p>Faktor Penyebut:</p> <p>Jumlah perkara tata usaha negara yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan</p> <p>X 100</p>	100%
2.	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	<p>Faktor Pembilang:</p> <p>Jumlah kerugian negara yang berhasil diselamatkan dan dipulihkan melalui jalur gugatan perdata</p> <p>Faktor Penyebut:</p>	100%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Jumlah kerugian negara yang upaya penyelamatan dan pemulihannya dilakukan melalui jalur gugatan perdata X 100	
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pembantuan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain	50

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang Diselesaikan	Rp. 30.000,000
2.	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis	Rp. 7.200.000
3.	Pertimbangan Hukum/Pendampingan Hukum	Rp. 13.200.000
4.	Pengelolaan Halo JPN	Rp. 6.000,000
Jumlah		Rp. 56.400,000


Binjai, 20 Januari 2025.

Pihak Kedua,



 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
 BINJAI
 (SUHERI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TUN
 KEJAKSAAN NEGERI BINJAI

 (HORAS MONANG JEFFRY ANDI GULTOM,
 S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ZEFRI PANDAPOTAN SIMAMORA, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : JUFRI, S.H., M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BINJAI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, 20 Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BINJAI



(JUFRI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN
PENGELOLAAN BARANG BUKTI
KEJAKSAAN NEGERI BINJAI

(ZEFRI PANDAPOTAN SIMAMORA, S.H., M.H.)

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI
KEJAKSAAN NEGERI BINJAI TAHUN 2025**

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

NO	SAGARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara	<p>Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, penetapan status penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang diselesaikan</p> $\frac{\text{-----}}{\text{Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, PSP, hibah, dan lainnya yang ditangani}} \times 100$	95%
		Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara	<p>Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara</p> $\frac{\text{-----}}{\text{Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara}} \times 100$ <p>Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil pelaksanaan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga,</p>	95%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>lintas negara</p> $\frac{\text{Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara}}{\text{Nilai barang rampasan, sita eksekusi, dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya}} \times 100$ <p>Nilai barang rampasan, sita eksekusi, dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya</p> $\frac{\text{Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya dalam berdasarkan Putusan Pengadilan yang inkracht van gewijsde yang masih memiliki hak tagih}}{\text{Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara}} \times 100$	

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian Barang Bukti/Sitaan/Rampasan	Rp. 50,000,000
Jumlah		Rp. 50,000,000

Binjai, 20 Januari 2025,

Pihak Kedua,



(JUFRI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN
PENGELOLAAN BARANG BUKTI
KEJAKSAAN NEGERI BINJAI

(ZEFRI PANDAPOTAN SIMAMORA, S.H., M.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SRI NOVARIANTI SEMBIRING, S.H.**
Jabatan : **KAUR TATA USAHA, PERPUSTAKAAN DAN DASKRIMTI**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **JUFRI, S.H., M.H.**
Jabatan : **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BINJAI**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, 20 Januari 2025,

Pihak Kedua,

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BINJAI**

(JUFRI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

**KAUR TATA USAHA, PERPUSTAKAAN
DAN DASKRIMTI**

(SRI NOVARIANTI SEMBIRING, S.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **DESTRI SYAHPUTRA, S.H.**
Jabatan : **KAUR KEPEGAWAIAN, KEUANGAN DAN PNBP**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **JUFRI, S.H., M.H.**
Jabatan : **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BINJAI**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, 20 Januari 2025,

Pihak Kedua,

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BINJAI**



(JUFRI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

**KAUR KEPEGAWAIAN, KEUANGAN DAN
PNBP**

(DESTRI SYAHPUTRA, S.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **EMIL BRUNNER, S.H.**
Jabatan : **KASUBSI PENUNTUTAN UPAYA HUKUM LUAR BIASA
SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **JUFRI, S.H., M.H.**
Jabatan : **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BINJAI**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, 20 Januari 2025.

Pihak Kedua,

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BINJAI**

(JUFRI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

**KASUBSI PENUNTUTAN UPAYA HUKUM
LUAR BIASA SEKSI TINDAK PIDANA
KHUSUS**

(EMIL BRUNNER, S.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SOPIAN, A.Md**
Jabatan : **KAUR PERLENGKAPAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **JUFRI, S.H., M.H.**
Jabatan : **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BINJAI**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BINJAI**



(JUFRI, S.H., M.H.)

Binjal, 20 Januari 2025,

Pihak Pertama,

KAUR PERLENGKAPAN

(SOPIAN, A.Md)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ELLY SYAFITRI HARAHAP, S.H.**
Jabatan : **KASUBSI PRA PENUNTUTAN SEKSI TINDAK PIDANA UMUM**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **JUFRI, S.H., M.H.**
Jabatan : **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BINJAI**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, 20 Januari 2025,

Pihak Kedua,

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BINJAI**

(JUFRI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

**KASUBSI PRA PENUNTUTAN SEKSI
TINDAK PIDANA UMUM**

(ELLY SYAFITRI HARAHAP, S.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **MEIRITA PAKPAHAN, S.H.**
Jabatan : **KASUBSI PENUNTUTAN DAN EKSEKUSI DAN EKSAMINASI SEKSI TINDAK PIDANA UMUM**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **JUFRI, S.H., M.H.**
Jabatan : **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BINJAI**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, 20 Januari 2025,

Pihak Kedua,

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BINJAI**

(JUFRI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

**KASUBSI PENUNTUTAN DAN EKSEKUSI
DAN EKSAMINASI SEKSI TINDAK PIDANA
UMUM**

(MEIRITA PAKPAHAN, S.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **SONYA EVALIN BR SILALAH, S.H.**
Jabatan : **KEPALA SUB SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA SEKSI DATUN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **JUFRI, S.H., M.H.**
Jabatan : **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BINJAI**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, 20 Januari 2025,

Pihak Kedua,

**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BINJAI**

(JUFRI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA**

(SONYA EVALIN BR SILALAH, S.H.)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ANRINANDA LUBIS, S.H.**
Jabatan : **KASUBSI PENYIDIKAN SEKSI PIDANA KHUSUS**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **JUFRI, S.H., M.H.**
Jabatan : **KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BINJAI**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Binjai, 20 Januari 2025,

Pihak Kedua,


**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BINJAI**
(JUFRI, S.H., M.H.)

Pihak Pertama,

**KASUBSI PENYIDIKAN SEKSI PIDANA
KHUSUS**

(ANRINANDA LUBIS, S.H.)